

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia yang baru lahir ini belum memiliki badan-badan pemerintahan dan tentara. Walaupun demikian, para pemimpin di Jakarta waktu itu sudah memikirkan dan menggodok berbagai macam konsep dan praktik pemerintahan, termasuk alat-alat perlengkapan Negara yang sangat di butuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Memang, masalah utama pada awal proklamasi adalah kondisi Negara yang kelihatan sangat lemah. Aparat pemerintahan dan militer serta alat perlengkapan administrative dan persenjataan masih kurang memadai. Badan-badan keamanan yang muncul secara spontan di berbagai daerah tanpa mengalami kesulitan dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan masyarakat. Proses Revolusi itu sendiri mulanya hanya meliputi Jawa dan Sumatera saja, tapi perlahan-lahan merebak ke seluruh daerah bekas jajahan belanda di Indonesia. Selain itu, bala tentara jepang masih menganggap diri sebagai pihak yang “berkuasa” dan bersiaga penuh dengan senjata penuh di tangan sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari sekutu. Secara keseluruhan, situasi di Negara yang baru saja menyatakan kemerdekaannya itu berjalan tidak menentu.

Setelah masuknya tentara Sekutu ke Indonesia, mengubah pikiran Soekarno. Ternyata tentara Sekutu memicu terjadinya insiden. Ia setuju pendapat

para mantan pimpinan tentara Peta dan KNIL. Pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno, mengeluarkan Maklumat berdirinya tentara kebangsaan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bulan Oktober dan November merupakan bulan yang kritis. Insiden bersenjata dengan tentara Sekutu terjadi di beberapa kota besar. Karena itu pada bulan November 1945, sejumlah organisasi pemuda melakukan konsolidasi dalam Kongres Pemuda di Yogyakarta. Pada saat yang sama TKR berhasil memilih pemimpin baru, Kolonel Soedirman. (Djamhari, 2014:2)

Kelompok pemuda yang terdiri atas berbagai organisasi tetap memilih strategi konfrontasi. Kebijakan diplomasi Soekarno diartikan sebagai memberi kesempatan, tempat waktu (untuk konsolidasi lawan), terutama bagi tentara Belanda, yang organisasi dan kekuatannya pernah dilumpuhkan oleh tentara Jepang. (Nasution, 1956: 20).

Di kota Medan, Kemerdekaan baru di umumkan pada tanggal 6 Oktober 1945 yang kabarnya masih terdengar samar-samar di Sumatera Timur. Kabar gembira ini dirasakan tidak lama yang kemudian pada Tanggal 9 Oktober 1945 Tentara Inggris perwakilan dari Sekutu membonceng Belanda (NICA) datang memasuki kota Medan. NICA atau kepanjangan *Netherlands Indies Civil Administration* adalah sebuah badan pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk oleh Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J van Mook dan pembantu utamanya Ch. O. Van Der Plas selama mereka masih berkedudukan di Australia, tidak berapa lama sebelum Jepang menyerah. NICA inilah yang direncanakan Belanda menjadi badan resmi yang akan mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Jepang dan oleh Dr. Beck cs hendak diterapkan di

Sumatera Timur mendahului penyerahan kekuasaan secara resmi oleh Jepang kepada panglima tentara Inggris ditugaskan menduduki Sumatera Mereka diperbolehkan masuk setelah adanya persetujuan dari Gubernur kota Medan, Mr. M.T Hasan. Tentara Sekutu yang pada mulanya bertugas untuk membantu Belanda mengembalikan tentara Jepang, justru beralih membantu Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia (Prima, 1976:87).

Pembentukan pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, antara Agustus dan Oktober 1945, adalah saat yang menentukan dalam sejarah pulau itu. selama setengah abad, pemerintah kolonial sudah membangun lembaga dan infrastruktur yang menghubungkan seluruh pulau itu dengan Batavia/Jakarta, dan kemudian pada 1942-1945 Jepang memutuskan sebagian besar hubungan itu. ketika Jepang menyerah ada suatu periode kosong kekuasaan, sebuah peluang sempurna bagi Revolusi. Mereka yang meraih peluang itu dengan paling efektif adalah sebuah generasi baru yang antusias mengenai ide persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Tanpa banyak dorongan dari Jawa, serangkaian Revolusi spontan meletus di seluruh Sumatera, pantulan proses di Jawa tetapi sangat berbeda dengan proses itu. pemerintah pusat Republik boleh dikatakan tidak memiliki cara-cara langsung untuk mengendalikan Sumatera sampai april 1946, ketika sebuah rombongan di bawah pimpinan menteri pertahanan Amir Sjarifuddin mengadakan kunjungan keliling pulau itu. regu-regu propaganda pemuda yang di kirim dari Jakarta oleh Sjarifuddin pada september menjalin sebuah hubungan awal langsung, tetapi mereka baru tiba di Sumatera barat pada akhir oktober dan di Sumatera utara pada november. Keinginan pemuda di Sumatera utara untuk meniru apa yang mereka

ketahui, yang tidak banyak, mengenai contoh dari jawa sangat besar, tetapi keinginan itu bersifat spontan dan tidak terarah.

Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa Kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena itu bila dianggap tidak berhasil, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan. Sehubungan dengan itu pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini terjadi terutama karena sering terjadi konflik di antara partai-partai politik. Seringnya pergantian kabinet membuat masa yang singkat (1950-1959) dikuasai oleh beberapa kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet Natsir (Masyumi 1950- 1951), Kabinet Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi 1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet 1957-1959). Jatuh banggunya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena adanya konflik antara partai politik.

Kabinet ini mempunyai rencana kerja untuk lima tahun. Rencana kerja ini disebut rencana lima tahun. Isinya antara lain adalah perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Otonomi daerah, mengusulkan perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan Dewan Ekonomi Nasional.

Sementara program berjalan timbul masalah-masalah baru. Pertama kegagalan dalam memaksa pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB. Kedua, berkembangnya masalah anti Cina di kalangan rakyat yang tidak senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Sehingga perkelahian dan pengerusakan beberapa kota. Ketiga di beberapa daerah timbul perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan terjadinya pergolakan di beberapa daerah. Pergolakan daerah itu mendapat dukungan dari beberapa panglima TNI-AD, mereka merebut kekuasaan di daerah dengan cara membentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah di Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. (Bangun, 1996:201).

Untuk mengatasi keadaan ini Presiden mengumumkan berlakunya undang-undang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. Sebab itu ia mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur kabinet. Kabinet Djuanda (1957-1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional yang bertugas memberi nasehat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan keputusan terjadi

Peristiwa Cikini, yaitu percobaan pembunuhan Presiden. Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu lima kali 24 jam. Presiden ternyata tidak menghiraukan hal ini sehingga akhirnya Dewan Banteng memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. (Djamhari, 2014:2)

Disamping gerakan anti Cina, Kabinet Ali menghadapi ketidak senangan yang timbul di daerah- daerah. Bahwa di beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterimanya dari pusat. Selain daripada ini mereka tidak menaruh kepercayaan lagi kepada pemerintah. Karena mengubah pemerintah dengan jalan parlementer tidak dapat dilakukan. Gerakan-gerakan pemerintah dapat dukungan dari para panglima dan terbentuklah dewan-dewan daerah yaitu Dewan Benteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Ahhmat Husein, Komandan Resimen Ifantri 4 pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan gajah dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon Panglima Tentara Teritorium I (TT I) di Medan pada tanggal 22 Desember 1956, Dewan garuda di Sumatra Selatan, dan Dewan Manguni dibentuk oleh Letnan Kolonel Vantje Sumual di Manado pada tanggal 18 Februari 1957.

Menanggapi peristiwa itu, Presiden Soekarno menyerukan kepada Simbolon agar segera kembali ke jalan yang seharusnya ditempuh oleh tentara. Seruan oleh Presiden itu ternyata tidak dihiraukan oleh Simbolon. Ia kemudian menuntut agar kerukunan Dwitunggal-Hatta dipulihkan kembali serta menuntut agar Presiden RI berada di kendalian Dwitunggal. Tindakan Kolonel Maludin

Simbolon dengan membentuk Dewan Gajah dan memisahkan diri dari pemerintah pusat ternyata mendapat tantangan dari beberapa penwira dan pejabat di Sumatra utara. Kepala Staf TT I Letkol Djamin Gintings bersama Letkol Wahap Makmur menentang tindakan Kolonel Simbolon yang menantang hukum.

Kabinet Ali kemudian memecat Kolonel Maludin Simbolon dari jabatan Panglima TT I. selanjutnya berpedoman dengan keputusan Pemerintah Pusat dalam menanggulangi masalah Sumatra utara, Letkol Djamin Gintings telah mengambil alih kekuasaan di TT I yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 1956. Letkol Djamin Gintings bersama dengan Letkol Wahap Makmur berhasil mendesak pasukan-pasukan Simbolon dari Kota Medan. Bersama sisa pasukan sebanyak 300 orang ia kemudian mengundurkan diri ketanjung Morawa. Di daerah tersebut pasukan Simbolon dapat perlindungan dari pasukan yang dibawah pengaruh Dewan Benteng. Dengan mundurnya Simbolon beserta anak buahnya keluar Kota Medan, maka praktis aktifitas Dewan Gajah telah dapat dilumpuhkan. Selanjutnya dalam menghadapi masalah Dewan Benteng maka Pemerintah Pusat mengirimkan misi ke Sumatra Tengah yang disebut: Komisi Penyelidik terdiri dari Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Abdul Latief dan Soeleman Effendi. Tugas Komisi ini mengadakan penjagaan dan penyelidikan tentang dasar-dasar tuntutan daerah yang disalurkan melalui Dewan Benteng. Tugas Komisi menghadapi hambatan, karena ternyata Letkol Ahmad Husein selaku Kepala Dewan Benteng dan pimpinan daerah Sumatra Tengah tidak bersedia mengadakan pembicaraan dengan anggota team tersebut. Letkol Husein hanya mau berbicara dengan delegasi yang resmi dari Kepala Negara. (Nasution, 1956: 20)

Meskipun masalah persoalan pada tingkat pimpinan angkatan darat dengan resmi telah dapat di selesaikan dengan baik, tetapi persoalan di daerah pada tingkat teritorium belum terselesaikan hingga tuntas. Perhentian perdagangan barter memang sudah di perintahkan, tetapi di beberapa daerah masih terus juga berlangsung. Tetapi tuntutan otonomi daerah masih tetap menghangat. Dengan ringkas dapat di simpulkan bahwa keadaan di beberapa daerah masih labil.

Pergolakan Daerah hingga terbentuknya Dewan Gajah menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Minimnya penulisan sejarah tentang perjuangan rakyat di daerah, serta pergolakan yang terjadi, khususnya di Sumatera Timur menjadi alasan lain mengapa penelitian ini perlu di lakukan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Pergolakan Daerah di Sumatera Utara.
2. Perkembangan Dewan Gajah
3. Terbentuknya Dewan Gajah
4. Pendiri Dewan Gajah

1.3. Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah bahwa kajian tentang Pergolakan Daerah pada masa awal kemerdekaan di Sumatera memiliki kajian

yang relatif luas. Oleh karena itu peneliti perlu membuat pembatasan masalah agar dapat lebih terarah dan fokus, maka peneliti memfokuskan kajian ini pada Pergolakan daerah di Sumatera utara serta terbentuknya Dewan Gajah di Sumatera Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Dewan Gajah pada masa pergolakan daerah di Sumatera Utara ?
2. Bagaimana perkembangan Dewan Gajah di Sumatera utara pada masa pergolakan daerah di Sumatera Utara ?
3. Bagaimana bentuk pergolakan yang dilakukan Dewan Gajah di Sumatera Utara ?

1.5. Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya Dewan Gajah di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui perkembangan dewan gajah pada masa pergolakan daerah di Sumatera utara.
3. Untuk mengetahui keadaan masyarakat pada masa pergolakan daerah di Sumatera Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pembaca
 - a. Dengan membaca skripsi ini diharapkan dapat mengetahui sejarah pembentukan Dewan-Dewan pada masa awal kemerdekaan, Khususnya Dewan Banteng antara tahun 1950-1957.
 - b. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca.
 - c. Setelah membaca skripsi ini diharapkan pembaca akan mengetahui pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dengan di bentuk nya Dewan-Dewan Revolusi pada awal emerdekaan Indonesia.

4. Bagi Penulis
 - a. Sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam meneliti, menganalisis, dan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah serta menyajikan dalam bentuk karya sejarah.
 - b. Dengan skripsi ini diharapkan penulis dapat berpikir lebih kritis dan objektif dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada.
 - c. Penulis dapat belajar banyak tentang sejarah Pembentukan Dewan Gajah, perkembangannya dan kemiliteran di Indonesia.